

LKJIP TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis dimaksud diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman. Laporan kinerja, menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta inovasi yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2021. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Dinas Perumahan dan Permukiman telah mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dengan manajemen risiko. Dimana atas risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran telah diidentifikasi dan disiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengatasinya

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan.

Balikpapan 25 Februari 2021
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

I Ketut Astana

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memperhatikan program prioritas daerah dan isu-isu strategis bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkini, serta mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman 2016-2021 dalam menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. PK Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 merupakan implementasi dari 3 program prioritas, yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman

Perjanjian kinerja ini ditetapkan ke dalam 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sasaran. Secara umum penyelenggaraan Tahun 2020 dapat dikatakan sangat berhasil.

tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KINERJA		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,28	0	0
2.	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	77	45,70	140,65
3.	Mengurangi Persentase Rumah Tidak LayakHuni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,84	0,29	165,48
4.	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,019	0,10	526
5.	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	96	100	104,17

Kinerja Keuangan Tahun 2020

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah Rp.2.204.675.495,00 atau sebesar 146,78 % dari target sebesar Rp. 1.502.051.800,00. Anggaran belanja Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp.30.917.293.579.15 dan terealisasi sebesar Rp. 30.917.293.579.15 atau 89,02 % dengan silpa sebesar Rp. 3.814.424.974,85.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I .PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Tugas dan Fungsi.....	1
C.Struktur Organisasi	3
D.Isu Strategis.....	4
E.Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
A.PerencanaanStrategis.....	8
Tujuan dan Sasaran	9
B.Rencana KinerjaTahunan	10
Strategi dan Kebijakan.....	11
Strategi :	11
Kebijakan.....	11
C.Perjanjian Kinerja Tahun2020.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	21
2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.....	31
3. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman	31
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	32
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
B. Realisasi Anggaran	40
C. Capaian Prestasi dan penghargaan	48
BAB IV. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020	II
tabel 2. Target kinerja dinas perumahan dan permukiman tahun 2016 - 2021	10
tabel 3. Target kinerja dinas perumahan dan permukiman tahun 2016 - 2021	12
tabel 4. Program dan kegiatan dinas perumahan dan permukiman	13
tabel 5. Perjanjian kinerja tahun 2019 dinas perumahan dan permukiman kota balikpapan	16
tabel 6. Uraian dan formulasi iku dinas perumahan dan permukiman	18
tabel 7. perjanjian kinerja tahun 2020 dinas perumahan dan permukiman	20
tabel 8. Jumlah peningkatan kualitas rtlh berdasarkan sumber dana bantuan	27
tabel 9. Luas ruang terbuka hijau di kota balikpapan	28
tabel 10. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	31
tabel 11. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target akhir perencanaan strategis	32
tabel 12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada dinas perumahan dan permukiman kota balikpapan	35
tabel 13. Realisasi anggaran dinas perumahan dan permukiman tahun 2020	40
tabel 14. Tabel realisasi anggaran per sasaran strategis	42

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dinas perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai organisasi pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBD sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

B. Tugas dan Fungsi

Dasar pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
2. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
3. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
4. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
5. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
6. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
7. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
8. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
9. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
10. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
12. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
13. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
14. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
15. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum

- yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
16. pembinaan dan pengendalian UPT;
 17. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 18. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;

3. Bidang Perumahan membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana,
- c. Utilitas dan
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

4. Bidang Permukiman membawahkan :

- a. Seksi Permukiman;
- b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman

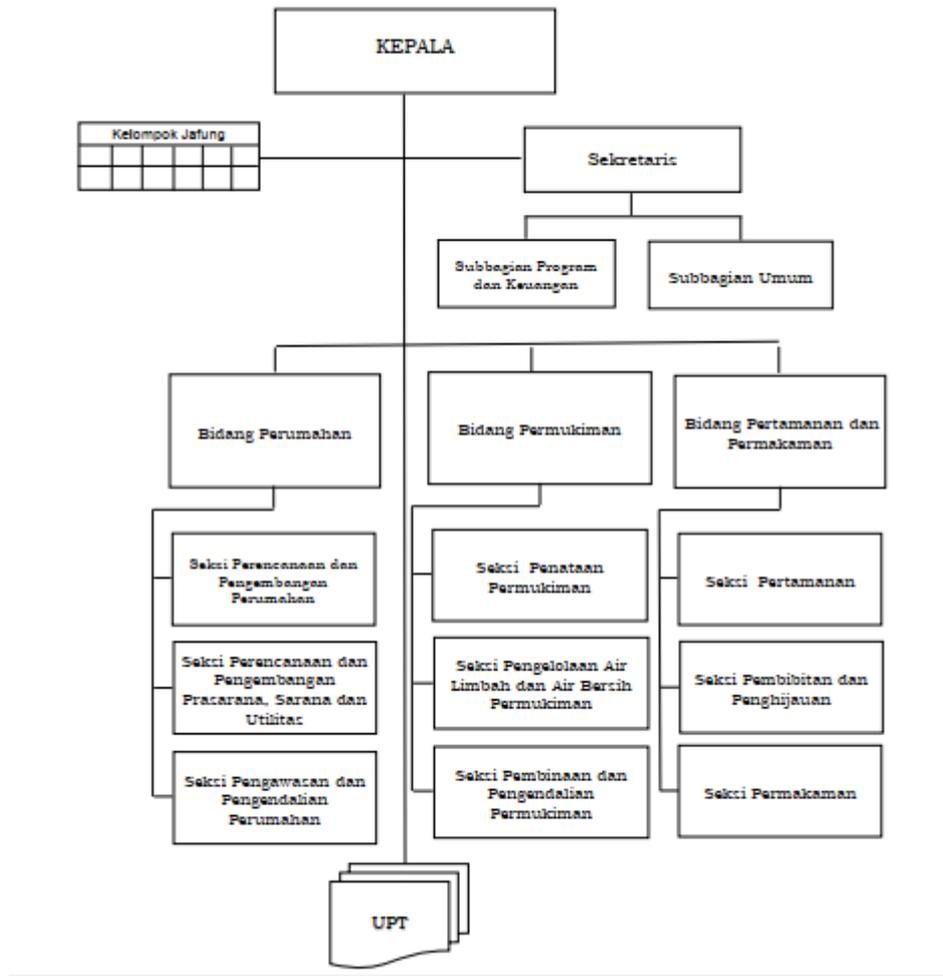
5. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan :

- a. Seksi Pertamanan;
- b. Seksi Permakaman; dan
- c. Seksi Pembibitan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPT Rumah Susun Sewa

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman



D. Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJMD Kota Balikpapan, Renstra Disperkim dan RTRW Kota Balikpapan), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (*Focus Group Discussion*) dengan OPD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan.

Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, tetapi identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas. Berpijak pada uraian di atas, dengan mendasarkan pada evaluasi internal organisasi, studi kepustakaan dan olah data, hasil kajian dan diskusi dalam forum-forum koordinasi antar pemangku kepentingan, serta hasil pengamatan selama menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait bidang urusan yang ditangani dan memetakannya sebagai berikut :

1. Tingginya *backlog* perumahan

Pemerintah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan). Jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan tiap tahun, sehingga diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi *backlog* perumahan. Ketidak seimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada, ditambah lagi dengan semakin tingginya arus perpindahan penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan menyebabkan masalah *backlog* perumahan menjadi isu utama yang harus ditangani dengan maksimal.

2. Masih perlunya penanganan lebih lanjut kawasan permukiman kumuh. Meskipun pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan dinyatakan bebas kumuh berdasarkan data basis baseline KOTAKU, namun masih banyak peer penanganan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara maksimal. Dari tujuh indikator kumuh masih ada beberapa

indikator yang belum tersentuh seperti masalah ketidak teraturan bangunan, proteksi kebakaran, sanitasi dan rumah tidak layak huni. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

3. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni.

Berkaca dari penanganan kawasan kumuh di kota Balikpapan yang ditangani, salah satunya bisa disebabkan karena masih adanya rumah tidak layak huni, yang secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu suatu permukiman menjadi kumuh. Masih adanya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Balikpapan diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman selama tahun 2019, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman; serta struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman selama tahun 2016-2021, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2019, serta realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman serta strategi pemecahan masalah.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode Tahun 2016-2021, yaitu “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan ,terutama pada misi ke dua yaitu : “**Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan**”, menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membangun Kota Balikpapan, karena indikator misi kedua tersebut merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan harus disukseskan untuk dicapai.

Dalam kaitan hal tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.

VISI

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah “**TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI**”

MISI

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas.
2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata.
3. Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Perumahan dan Permukiman disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	capaian s.d. Th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	%	2,45	2,41	2,37	2,32	2,28	2,23
Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	%	89	83	81	79	77	75
	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,011	0,011	0,014	0,017	0,019	0,022
	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	%	90	92	94	95	96	98

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 memerlukan penjabaran dari sasaran strategis diatas harus dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Strategi :

- a. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
- b. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman
- c. Mendorong Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Fasilitasi Pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
- e. Meningkatkan Jumlah Fasilitas dan Pelayanan Sanitasi
- f. Pembangunan Taman kota baru
- g. Perbaikan Layanan Permakaman

Kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan dengan strategi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Permukiman untuk mencegah kawasan kumuhbaru.
- b. Pengentasan wilayah rawan sanitasi dan perluasan pelayanan sanitasi.
- c. Penerapan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	2,32 %
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	79 %
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	0,85%
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	0,017 %
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Areal Permakaman yang Terkelola dan Terpelihara	95 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka direalisasikan melalui program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengantupoksinya.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2020 telah melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui 10 program dan 33 kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan
1	2	3	4
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	<p>Program Lingkungan Sehat</p> <p>Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh</p> <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat</p> <p>Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik</p> <p>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan</p> <p>Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan
1	2	3	4
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Kesegaran Rohani dan Jasmani Pegawai
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	Program Pengembangan perumahan Pengawasan Penertiban Perumahan Program Pengelolaan Rumah Susun Operasional Infrastruktur Rumah Susun Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK 2020)
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan
1	2	3	4
			Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota (Lanjutan)
			Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	Program Pengelolaan Areal Permakaman
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana

C. Perjanjian Kinerja Tahun2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabattersebut.

Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan danPermukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	2,28
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	Persen	77
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Persen	0,84
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	Persen	0,019
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	Persen	96

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward* or *punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan.

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman adalah uraian sebagai berikut:

Tabel 6. Uraian dan Formulasi IKU Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi IKU
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	<u>Luas Kawasan Kumuh</u> Rencana Luas Kawasan Permukiman Pada RTRW
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	<u>Jumlah <i>Backlog</i></u> Jumlah Rumah
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	<u>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</u> Jumlah Rumah
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	<u>Luas Taman</u> Luas Kawasan Perkotaan
5	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan Pemakaman	<u>Ahli Waris yang merasa puas</u> Ahli waris yang mengajukan pelayanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (Lima) indikator merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Namun dalam perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil Capaian

kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil Capaian

kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis. Adapun kelima sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	2,28
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	%	77
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,84
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,019
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	%	96

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan	677.633.367	APBD
Program Pengembangan Perumahan	12.024.850	APBD
Program Pengelolaan Rumah Susun	3.448.814.900	APBD
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1.964.295.190	APBD ,DAK
Program Pengelolaan Areal Permakaman	3.602.728.400	APBD
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13.507.814.297,06	APBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.100.961.950	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.725.918.000	APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.100.000	APBD

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2020 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh				
1	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,28	0	0

Realisasi pencapaian indikator sasaran yaitu persentase berkurangnya luas Kawasan kumuh sebesar % diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Persentase berkurangnya} &= \frac{\sum \text{Luas Kawasan Kumuh}}{\sum \text{Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{11.500} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \underline{\text{tidak ada pencapaian kinerja}}$$

Realisasi sebesar 0 % pada indikator kinerja utama penurunan luasan kawasan kumuh dikarenakan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019. Atas dasar SK tersebut, maka tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19. Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah.

Atas dasar hal tersebut, kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2020 hanya berupa penanganan kumuh dibawah skor kumuh 19 yang terdiri atas :

1. Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh dengan anggaran Rp. 2.750.000.000,00 yang pada awalnya akan digunakan untuk peningkatan layanan permukiman seperti pembuatan drainase, pengadaan bangunan pelengkap air bersih/ baku tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.
2. Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp. 330.000,00 yang pada awalnya akan digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.
3. Kegiatan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh dengan jumlah anggaran Rp.453.885.600 dan terealisasi sebesar Rp.452.639.205,40 atau sebesar 99,73%. Kegiatan ini meliputi peningkatan sarana sanitasi berupa pemasangan *septic tank* individu di kelurahan Manggar, Balikpapan Timur sebanyak 42 Sambungan Rumah.

Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2022-2024 dengan berbagi kewenangan bersama-sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Meskipun telah berhasil mengentaskan kawasan permukiman kumuh berdasarkan data basis baseline numerik dengan 0 ha dan memiliki skor kumuh dibawah 19, Pokja PKP Kota Balikpapan harus tetap menangani pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah secara serius. Upaya pemenuhan pelayanan permukiman tersebut pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas kepada *refocusing*

anggaran untuk penanganan Covid-19. Agar pemenuhan pelayanan dasar tersebut dapat tetap di penuhi, meskipun APBD masih memprioritaskan penanganan Covid-19, kedepannya Dinas Perumahan dan Permukiman mengupayakan hal tersebut melalui usulan DAK integrasi.

2. Terdapat pengurangan prasarana pengelolaan air limbah berupa sambungan rumah yang telah diupayakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan kurangnya pengawasan pihak berwenang di wilayah prasarana tersebut. Kurangnya pengawasan dan evaluasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah oleh masyarakat pengguna sistem terpusat. Diperlukan penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sanitasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak terkait agar Prasarana pengelolaan air limbah yang telah terpasang tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 2 : Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan				
1	Persentase penurunan <i>backlog</i> perumahan	77%	45,70%	140,65

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan *Backlog* Perumahan sebesar 140,65% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase } \textit{Backlog} &= \frac{\sum \textit{Backlog}}{\sum \text{Rumah}} \times 100\% \\
 &= \frac{92.556}{202.539} \times 100\% \\
 &= 45,70\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{77 - (45,70 - 77)}{77} \times 100\% \\
 &= 140,65 \%
 \end{aligned}$$

Jika dianalisa lebih lanjut pada dasarnya *backlog* perumahan terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Backlog Hunian
2. Backlog Kepemilikan

Sementara itu Kota Balikpapan jika dibagi berdasarkan jenis backlog tersebut pada dasarnya yang memiliki poin tertinggi adalah dari backlog kepemilikan, artinya jika dianalisa lebih dalam pada dasarnya penduduk di Kota Balikpapan sudah sebagian besar telah menempati rumah/tempat tinggal, baik itu statusnya sewa maupun kontrak, namun jika dihitung dari backlog kepemilikan maka angkanya masih cukup tinggi dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki/membeli rumah sendiri, sehingga mereka harus tinggal di rumah sewa maupun rumah kontrak.

Berikut Data berdasarkan backlog kepemilikan dan backlog hunian yaitu total backlog kepemilikan sebesar 92.556 unit dengan rata-rata backlog kepemilikan sebesar 15.425 unit dan Backlog Hunian sebesar surplus 27.032 unit dengan rata-rata backlog hunian sebesar 4.505 unit. Persebaran backlog perumahan terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu mencapai 22.035 unit. Terlampir data persebaran backlog hunian dan backlog kepemilikan di kota Balikpapan.

Di sisi lain, terkait solusi alternatif guna memenuhi tuntutan penyediaan rumah yang layak huni untuk kepentingan pengurangan *backlog*, yaitu berupa penyediaan rumah susun di Kota Balikpapan yang telah terbangun sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Keberhasilan pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan dan program pengelolaan rumah susun sebagai berikut :

Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan. Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan yang pada awalnya memiliki alokasi anggaran Rp.200.000.000,00 karena pandemic Covid-19, kegiatan ini di *refocusing* menjadi Rp.12.024.850,00 dan terealisasi Rp.8.770.135,00 atau sebesar 72,93 %. Kegiatan ini meliputi biaya operasional pengawasan di lapangan.

Program Pengelolaan Rumah Susun, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA). Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rusunawa dengan anggaran Rp.1.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok berupa Pengadaan Jaringan air minum dan Pengadaan Bangunan Siring terealisasi sebesar Rp. 1.286.234.205,39 atau sebesar 85,75%. Silpa merupakan sisa nilai kontrak.

2. Operasional Infrastruktur Rumah Susun. Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun dengan anggaran Rp.2.000.000.000,00 yang kemudian dirasionalisasi karena *refocusing* APBD untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp. 1.868.814.900 terealisasi sebesar Rp. 1.389.293.115 (74,34%) meliputi honorarium petugas pengamanan dan operasional di Sembilan Rusunawa termasuk biaya operasional dan perbaikan rusunawa.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Tersedianya Rumah Susun Sederhana dari Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat Sembilan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan dengan daya tampung rata-rata 96 kamar per rusunawa
2. Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Program Satu Juta Rumah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kontribusi 20% dari target khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan pembangunan perumahan oleh pengembang swasta melalui skema subsidi untuk MBR sebanyak 30% dan skema nonsubsidi atau non-MBR sebanyak 50%.
3. Program rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka.

Permasalahan yang dihadapi :

Antisipasi dalam mengatasi *backlog* kepemilikan rumah, karena diasumsikan bahwa jumlah *backlog* tiap tahun akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah keluarga baru yang belum memiliki rumah, sementara faktor alam berupa lahan yang akan digunakan untuk perumahan semakin terbatas kedepannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada gilirannya akan menimbulkan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman yang sangat besar, sementara kemampuan pemerintah sangat terbatas, menurut catatan hanya 15% kebutuhan perumahan yang mampu disediakan oleh pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 85% disediakan langsung oleh masyarakat atau swasta.

Apabila pembangunan perumahan yang dilakukan masyarakat atau swasta ini tidak dikendalikan pengembangannya akan menimbulkan masalah besar yang mengancam kawasan konservasi atau kawasan lindung. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memberdayakan atau menguatkan peran masyarakat agar mampu

memenuhi kebutuhan perumahannya sendiri yang sehat, aman serasi dan produktif tanpa merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat luas.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 3 : Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni				
1	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	0,84%	0,29%	165,48%

Realisasi pencapaian indicator sasaran persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 165,48% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan Rumah tidak layak huni} &= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tidak Layak Huni}}{\Sigma \text{ Rumah}} \times 100\% \\
 &= \frac{578}{202.539} \times 100\% \\
 &= 0,29\% \\
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,84 - (0,29 - 0,84)}{0,84} \times 100\% \\
 &= 165,48\%
 \end{aligned}$$

Indikator sasaran strategis 3 adalah penurunan persentase rumah tidak layak huni dari target 1.030 unit pada tahun 2017 menjadi 721 unit pada tahun 2019, sementara berdasarkan data terbaru dari pekerjaan pendataan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2020 diperoleh hasil bahwa terdapat 578 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Ini artinya dari target 1.015 RTLH di tahun 2021 justru fakta di lapangan cukup menggembirakan karena RTLH yang ada justru di bawah angka 1.015 unit yaitu tersisa 578 unit.

Pencapaian target kinerja tersebut diakomodir melalui kegiatan:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Rp.218.670.190 terealisasi sebesar Rp.217.696.635,00 meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak

13 rumah di Kelurahan Manggar.

2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK). Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 1.745.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.720.974.000,00. Kegiatan ini meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 96 rumah di Kelurahan Muara Rapak.
3. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 60 Rumah di Kelurahan Sepinggang Raya, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Manggar

Tabel 8. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan

No	Sumber Dana	Jumlah Rumah
1	DAK	96
2	APBD	13
3	Provinsi Kalimantan Timur	60

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Hasil verifikasi calon penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Proses verifikasi dilakukan dengan teliti, sehingga tidak ada calon penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan sudah berjalan.
2. Kerjasama semua pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 4 : Meningkatnya Penyediaan Taman Kota				
1	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,019%	0,10%	526%

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penyediaan taman kota sebesar 526 % dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\text{Persentase penyediaan} = \frac{\Sigma \text{Luas Taman Kota}}{\Sigma \text{Luas Kawasan Perkotaan (354,62 km}^2\text{)}} \times 100\%$$

Taman kota

$$= \frac{340.396}{354.620.000} \times 100\%$$

$$= 0,10\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,10}{0,019} \times 100\% \\ &= 526\% \end{aligned}$$

Pencapaian target kinerja penyediaan taman kota berhasil memenuhi target sebesar 526 %. *Refocusing* anggaran tahun 2020 yang di tujukan untuk penanganan pandemic *Covid-19* mengakibatkan tidak adanya pembuatan taman baru di 2020, namun keberhasilan pencapaian yang besar terhadap penyediaan taman kota ini dikarenakan adanya penyerahan PSU berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Berikut jumlah keseluruhan RTH di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2020

Tabel 9. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas (m ²)
1.	Balikpapan Tengah	6.201
2.	Balikpapan Utara	56.595,95
3.	Balikpapan Selatan	235.897
4.	Balikpapan Timur	30.400
5.	Balikpapan Barat	416,21
6.	Balikpapan Kota	10.886
J U M L A H		340.396,16

Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota, dengan anggaran Rp.9.688.328.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.067.928.173,00 (93,60%). *Refocusing* anggaran untuk penanganan *covid-19* mengakibatkan kegiatan pembuatan taman atau prasarana pendukung lainnya ditiadakan. Tahun 2020 kegiatan ini hanya mengakomodir operasional pemeliharaan taman kota yang sudah ada dan juga DED pembuatan RBRA di taman tiga generasi.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh. Kegiatan ini memiliki dengan anggaran Rp. 2.991.675.000,00. Seperti halnya kegiatan RTH lain, *Refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 mengakibatkan kegiatan pembuatan prasarana pendukung pembibitan ditiadakan. Tahun 2020 kegiatan ini hanya mengakomodir operasional pemeliharaan pembibitan di kota hijau dan km.12 serta pengadaan bibit tanaman hias dan peneduh untuk persediaan tanaman di taman- taman kota Balikpapan.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Permakaman				
1	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan permakaman	96%	100%	104,17 %

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman 104,17% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ahli waris yang} &= \frac{\Sigma \text{Ahli Waris yang merasa puas}}{\Sigma \text{Ahli Waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100\% \\
 \text{puas terhadap pelayanan} & \\
 \text{permakaman} & \\
 &= \frac{1.829}{1.829} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{100}{96} \times 100\% \\
 &= 104,17\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman dengan anggaran Rp.3.602.728.400,00 yang meliputi kegiatan operasional pendukung pemeliharaan permakaman di kota Balikpapan.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Secara umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
2. Terlaksananya SOP Permakaman sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semua proses pelayanan permakaman kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3. Koordinasi dan konsultasi, kegiatan koordinasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan (Dinas/Instansi terkait).
4. Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas lapangan di permakaman yang tersebar di kota Balikpapan.

Permasalahan yang dihadapi :

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya lahan permakaman yang dapat disediakan pemerintah Kota.
2. Untuk mengantisipasi ketersediaan lahan permakaman maka Pemerintah Kota telah membangun TPU Km.15, namun dikarenakan jaraknya yang cukup jauh sehingga banyak keluarga yang hendak memakamkan anggota keluarganya lebih memilih untuk memakamkan di TPU yang terdekat di tempat tinggal. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih lokasi permakaman.
3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur permakaman seperti pemakaian mobil jenazah dan kegiatan gali kubur ataupun proses memindahkan kerangka.

4. Tingginya angka kematian di tahun 2020, mengakibatkan dituntutnya kerja keras yang lebih dari seksi permakaman agar permakaman khususnya dengan protokol covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, efektif dan efisien.

2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2020 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi		Capaian	
			2019 (%)	2020 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,28	0	0	200	0
2	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	77	42,88	45,70	146	145,17
3	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,84	0,77	0,36	110,46	158,83
4	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,019	0,013	0,015	9,17	88,23
5	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	96	100	95	100	105

3. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2020 dengan target akhir Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021	
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Mengurangi Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2.28	0	0	2.23	200
Mengurangi Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	77%	45.70	140.65	75	139.07
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0.84	0.29	165.48	0.83	165.06
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0.019	0.10	526	0.025	400
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	96	100	104,17	100	80

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2020 disajikan sebagai berikut;

1. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran pertama yaitu Mengurangi Luas Kawasan Kumuh saat ini dengan menggunakan indikator persentase berkurangnya luas kawasan kumuh memiliki target 2,28 % pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019. Atas dasar SK tersebut, maka target penurunan luasan kumuh menjadi 2,28% pada tahun 2020 telah terlampaui menjadi 0 Ha. Bahkan target akhir Renstra 2016-2021 sebesar 2,23 % dengan dasar SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/ 2014 Tentang Lokasi Penetapan Perumahan Kumuh dan Perkumiman Kumuh di Kota

Balikpapan dengan Luasan 282,Ha pun telah terlampaui di 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2020 tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19.

Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dan Pokja PKP dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah. Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2022-2024 dengan berbagi kewenangan bersama-sama Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

2. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran kedua yaitu mengurangi *backlog* perumahan saat ini dengan menggunakan indikator persentase penurunan *backlog* perumahan Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan realisasi yaitu dari penurunan 42.88 % menjadi 45,70 %. Meskipun terjadi penurunan realisasi dari tahun kemarin, namun realisasi tahun ini tetap berhasil melampaui target pengurangan *backlog* di tahun 2020 yaitu penurunan *backlog* perumahan menjadi 75%. Terjadinya penurunan realisasi dari tahun kemarin dikarenakan adanya penambahan penduduk kota Balikpapan yang tidak diiringi penambahan jumlah rumah yang signifikan dalam mengimbangi penambahan penduduk tersebut. Hal tersebut disebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah sendiri ditambah dengan pandemi *covid-19* di tahun 2020 yang melemahkan ekonomi kota Balikpapan dan daya beli masyarakat.
3. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran ketiga yaitu mengurangi persentase rumah tidak layak huni saat ini dengan menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari penurunan 0,36 % menjadi 0,29%. Keberhasilan peningkatan target kinerja tersebut merupakan hasil dari pada intervensi kegiatan fisik yang bersumber Dana Alokasi Khusus, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kota Balikpapan.
4. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran keempat yaitu meningkatnya penyediaan taman kota saat ini dengan menggunakan indikator persentase penyediaan taman kota. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun

sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari 0,04% menjadi 0,10 %. Meskipun *refocusing* anggaran tahun 2020 yang di tujukan untuk penanganan pandemic *covid-19* mengakibatkan tidak adanya pembuatan taman baru di 2020, namun realisasi terhadap penyediaan taman kota ini meningkat secara signifikan dari tahun kemarin. Hal ini disebabkan adanya penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020.

5. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran kelima yaitu meningkatnya pelayanan permakaman saat ini dengan menggunakan indikator persentase ahli waris yang puas terhadap layanan permakaman. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya terdapat kesamaan angka realisasi yaitu 100 %. Keberhasilan mempertahankan kinerja yang baik untuk sasaran strategis ini di sebabkan oleh Secara Umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Terlebih dalam situasi pandemic covid-19 seperti ini, pelayanan permakaman baik secara protocol covid-19 maupun non covid tetap dapat dilakukan secara optimal. Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas lapangan di permakaman yang tersebar di kota Balikpapan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2020. Berdasarkan pagu definitif TA 2020, anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp.34.731.718.554, dengan realisasi mencapai Rp.30.917.293.579.15 atau 89,02 %.

Tabel 12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada dinas perumahan dan permukiman kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis		Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6		8	10	11	12	13	14 (6-13)
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2.28	0	-		Program Lingkungan Sehat	Rp 677,633,367.00	Rp 652,484,923.40	96.29	87.71	-87.71
						Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Rp 3,300,000.00	Rp 3,300,000.00	100.00			
						Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 14,700,000.00	Rp 14,607,521.00	99.37			
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat	Rp 205,747,767.00	Rp 181,938,197.00	88.43			
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Rp 453,885,600.00	Rp 452,639,205.40	99.73			
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,100,961,950.00	Rp 804,340,025.73	73.06			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,500,000.00	Rp 1,200,000.00	21.82			

No	Sasaran Strategis		Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6		8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp 198,640,000.00	Rp 86,078,742.00	43.33		
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 56,895,450.00	Rp 6,679,180.00	11.74		
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 211,133,000.00	Rp 206,490,695.73	97.80		
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 55,117,500.00	Rp 54,888,900.00	99.59		
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 59,121,000.00	Rp 51,910,560.00	87.80		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15,000,000.00	Rp 14,647,600.00	97.65		
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 14,580,000.00	Rp 13,482,000.00	92.47		
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 57,865,000.00	Rp 51,061,000.00	88.24		

No	Sasaran Strategis		Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6		8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Rp 195,000,000.00	Rp 123,630,542.00	63.40		
							Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 232,110,000.00	Rp 194,270,806.00	83.70		
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 3,725,918,000.00	Rp 3,036,272,522.57	81.49		
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 89,090,000.00	Rp 84,671,400.00	95.04		
							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 305,400,000.00	Rp 273,018,900.57	89.40		
							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 54,228,000.00	Rp 41,728,500.00	76.95		
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 3,277,200,000.00	Rp 2,636,853,722.00	80.46		
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 2,100,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00		

No	Sasaran Strategis		Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6		8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Pembinaan Kesegaran Rohani dan Jasmani Pegawai	Rp 2,100,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00		
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	77	45.7	140.65		Program Pengembangan perumahan	Rp 12,024,850.00	Rp 8,770,135.00	72.93	75.26	65.39
							Pengawasan Penertiban Perumahan	Rp 12,024,850.00	Rp 8,770,135.00	72.93		
							Program Pengelolaan Rumah Susun	Rp 3,448,814,900.00	Rp 2,675,527,320.39	77.58		
							Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Rp 1,868,814,900.00	Rp 1,389,293,115.00	74.34		
							Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Rp 1,580,000,000.00	Rp 1,286,234,205.39	81.41		
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0.84	0.29	165.48		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Rp 1,964,295,190.00	Rp 1,938,670,635.00	98.70	98.70	66.78
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Rp 218,670,190.00	Rp 217,696,635.00	99.55		
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK 2020)	Rp 1,745,625,000.00	Rp 1,720,974,000.00	98.59		
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0.019	0.10	526.00		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 13,507,814,297.06	Rp 12,704,011,413.06	94.05	94.05	431.95

No	Sasaran Strategis		Kinerja				Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6		8	10	11	12	13	14 (6-13)
							Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota (Lanjutan)	Rp 39,747,097.06	Rp 39,747,097.06	100.00		
							Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Rp 9,688,328,200.00	Rp 9,067,928,173.00	93.60		
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Rp 3,779,739,000.00	Rp 3,596,336,143.00	95.15		
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	96	100	104.17		Program Pengelolaan Areal Permakaman	Rp 3,602,728,400.00	Rp 3,435,980,950.00	95.37	95.37	8.80
							Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana	Rp 3,602,728,400.00	Rp 3,435,980,950.00	95.37		
Rata-rata Capaian Kinerja					187.26			Rp 28,042,290,954.06	Rp 25,258,157,925.15	90.07%	90.22	97.04
Total Belanja Langsung sesuai SIMONTEPRA												
Rata-rata Capaian Anggaran sesuai SIMONTEPRA												
Rata-rata Tingkat Efisiensi (Capaian Kinerja dikurangi Capaian Anggaran)												

Dibandingkan dengan kinerja pada capaian tahun 2020, maka realisasi anggaran sebesar 90,07% dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 187,26 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 97,04 %

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. yang diukur atas realisasi terhadap APBD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2020 (setelah perubahan), maka realisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	1.502.051.800,00	2.204.675.495,00	146,78%
Belanja	34.731.718.554,06	30.917.293.579,15	89,02%

Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2019 guna mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Perubahan yang terdiri atas Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 1.502.051.800,00 (Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa dan Sewa Rumah Dinas) dan terealisasi sebesar Rp.2.204.675.495,00
2. Pagu APBD tahun 2020 adalah sebesar Rp.51.236.580.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp.6.907.633.000,00

- b. Belanja Langsung Rp. 44.328.947.600,00
- 3. Pagu APBD Perubahan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 34.731.718.554,06 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp.6.689.427.600,00
 - b. Belanja Langsung Rp.28.042.290.954,06
- 4. Realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 30.917.293.579,15 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 5.659.135.654,00
 - b. Realisasi Belanja Langsung Rp. 25.258.157.925,15

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Tabel Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2.28	0	-	Program Lingkungan Sehat	Rp 677,633,367.00	Rp 652,484,923.40	96.29
						Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Rp 3,300,000.00	Rp 3,300,000.00	100.00
						Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 14,700,000.00	Rp 14,607,521.00	99.37
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat	Rp 205,747,767.00	Rp 181,938,197.00	88.43
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Rp 453,885,600.00	Rp 452,639,205.40	99.73
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,100,961,950.00	Rp 804,340,025.73	73.06

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2		4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,500,000.00	Rp 1,200,000.00	21.82
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp 198,640,000.00	Rp 86,078,742.00	43.33
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 56,895,450.00	Rp 6,679,180.00	11.74
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 211,133,000.00	Rp 206,490,695.73	97.80
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 55,117,500.00	Rp 54,888,900.00	99.59
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 59,121,000.00	Rp 51,910,560.00	87.80
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15,000,000.00	Rp 14,647,600.00	97.65

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2		4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 14,580,000.00	Rp 13,482,000.00	92.47
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 57,865,000.00	Rp 51,061,000.00	88.24
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Rp 195,000,000.00	Rp 123,630,542.00	63.40
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 232,110,000.00	Rp 194,270,806.00	83.70
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 3,725,918,000.00	Rp 3,036,272,522.57	81.49
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 89,090,000.00	Rp 84,671,400.00	95.04
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 305,400,000.00	Rp 273,018,900.57	89.40
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 54,228,000.00	Rp 41,728,500.00	76.95

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2		4	5	6	7	8	9	10
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 3,277,200,000.00	Rp 2,636,853,722.00	80.46
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 2,100,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00
						Pembinaan Kesegaran Rohani dan Jasmani Pegawai	Rp 2,100,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	77	45.7	140.65	Program Pengembangan perumahan	Rp 12,024,850.00	Rp 8,770,135.00	72.93
						Pengawasan Penertiban Perumahan	Rp 12,024,850.00	Rp 8,770,135.00	72.93
						Program Pengelolaan Rumah Susun	Rp 3,448,814,900.00	Rp 2,675,527,320.39	77.58
						Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Rp 1,868,814,900.00	Rp 1,389,293,115.00	74.34
						Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Rp 1,580,000,000.00	Rp 1,286,234,205.39	81.41

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2		4	5	6	7	8	9	10
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0.84	0.29	165.48	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Rp 1,964,295,190.00	Rp 1,938,670,635.00	98.70
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Rp 218,670,190.00	Rp 217,696,635.00	99.55
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK 2020)	Rp 1,745,625,000.00	Rp 1,720,974,000.00	98.59
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0.019	0.10	526.00	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 13,507,814,297.06	Rp 12,704,011,413.06	94.05
						Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota (Lanjutan)	Rp 39,747,097.06	Rp 39,747,097.06	100.00
						Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Rp 9,688,328,200.00	Rp 9,067,928,173.00	93.60

No	Sasaran Strategis		Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2		4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Rp 3,779,739,000.00	Rp 3,596,336,143.00	95.15
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	96	100	104.17	Program Pengelolaan Areal Permakaman	Rp 3,602,728,400.00	Rp 3,435,980,950.00	95.37
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana	Rp 3,602,728,400.00	Rp 3,435,980,950.00	95.37
Rata-rata Capaian Kinerja					187.26		Rp 28,042,290,954.06	Rp 25,258,157,925.15	90.07%
Total Belanja Langsung sesuai SIMONTEPRA									
Rata-rata Capaian Anggaran sesuai SIMONTEPRA									

C. Capaian Prestasi dan penghargaan

Selama tahun 2020, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan atas:

1. Terbaik II Kebersihan Kantor untuk Kategori Perangkat Daerah Dan Rumah Sakit
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat kerja untuk Kategori Perangkat Daerah dan Rumah Sakit.

Bab IV. Penutup

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan pelaksanaan organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal dengan harapan ada perbaikan dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2020 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap Perjanjian Kinerja 2020 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

LKjIP juga pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Disperkim, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala serta terdapat sasaran yang belum tercapai secara maksimal yang tentunya akan segera yang diupayakan perbaikannya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2020 dan Renstra Tahun 2016-2021 sudah tercapai yakni dari 5 sasaran strategis, keseluruhan lima sasaran strategis telah mencapai target kinerja. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2020 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.

TERIMA KASIH